

ANALISIS STRATEGIS MASTERPLAN SMART CITY

BUKU II



City At Night



KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI
SELATAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku 2: Master Plan *Smart City* Kota Palopo merupakan dokumen inti masterplan *Smart City* yang digunakan sebagai acuan pembangunan pencapaian tujuan *Smart City* Kota Palopo. Penyusunan buku 2 disusun untuk melakukan analisis arah pembangunan, strategi pembangunan *Smart City*, Rencana Aksi, dan Peta Jalan (Roadmap) *Smart City* Kota Palopo. Arah pembangunan *Smart City* Kota Palopo disusun berdasarkan hasil analisis visi, misi, sasaran, dan indikator utama *Smart City* Kota Palopo. Analisis strategis dan arah pembangunan *Smart City* disusun berdasarkan hasil identifikasi strategi yang terdapat pada Buku 1 yang kemudian diklasifikasi berdasarkan sub-dimensi *Smart City*, yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*. Penyusunan Dokumen Master plan *Smart City* diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan implementasi *Smart City* sehingga mampu mengakselerasi pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada di wilayah Kota Palopo.

Tim Penyusun Masterplan *Smart City*

Kota Palopo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	5
1. BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	7
1.3 Landasan Hukum	8
1.4 Kerangka Pikir	9
2 BAB II ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY	29
2.1 Visi, Misi, dan Sasaran Smart City Daerah	29
2.2. Indikator Utama Smart City	34
3 BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY	36
3.1 Smart Governance	36
3.2 Smart Branding	37
3.3 Smart Economy	38
3.4 Smart Living	39
3.5 Smart Society	40
3.6 Smart Environment	41
4 BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH	43
4.1 Rencana Aksi Smart City Daerah	43
4.1.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	43
4.1.2 Pengembangan Infrastruktur Pendukung	44
4.1.3 Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak	45
4.1.4 Penguatan Literasi	46
4.1 Rencana Aksi Smart City Setiap Dimensi	47
4.1.1 Rencana Aksi Smart Governance	47
4.1.2 Rencana Aksi Smart Branding	48
4.1.3 Rencana Aksi Smart Economy	49
4.1.4 Rencana Aksi Smart Living	51
4.1.5 Rencana Aksi Smart Society	53

4.1.6	Rencana Aksi Smart Environment.....	55
5	BAB IV PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH.....	59
5.1	Peta Jalan Jangka Pendek (2023).....	59
5.1.1	Peta Jalan Smart Governance	59
5.1.2	Peta Jalan Smart Branding	60
5.1.3	Peta Jalan Smart Economy.....	61
5.1.4	Peta Jalan Smart Living	62
5.1.5	Peta Jalan Smart Society	64
5.1.6	Peta Jalan Smart Environment.....	66
5.2	Peta Jalan Jangka Menengah (2024-2027).....	69
5.2.1	Peta Jalan Smart Governance	69
5.2.2	Peta Jalan Smart Branding	70
5.2.3	Peta Jalan Smart Economy.....	71
5.2.4	Peta Jalan Smart Living	73
5.2.5	Peta Jalan Smart Society	76
5.2.6	Peta Jalan Smart Environment.....	78
5.3	Peta Jalan Jangka Panjang (2028-2032)	81
5.3.1	Peta Jalan Smart Governance	81
5.3.2	Peta Jalan Smart Branding	82
5.3.3	Peta Jalan Smart Economy.....	84
5.3.4	Peta Jalan Smart Living	86
5.3.5	Peta Jalan Smart Society	89
5.3.6	Peta Jalan Smart Environment.....	92
6	DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Dimensi Smart City.....	10
Gambar 1.2. Dimensi Smart City.....	11
Gambar 1.3. Smart Governance	12
Gambar 1.4. Smart Branding	14
Gambar 1.5. Smart Economy	16
Gambar 1.6. Smart Living.....	17
Gambar 1.7. Smart Society	19
Gambar 1.8. Smart Environment	20
Gambar 1.9. Kerangka Keterkaitan antara Sasaran Smart City dengan RPJMD.....	22
Gambar 1.10. Kerangka Kodifikasi Program Smart City	22
Gambar 1.11. Standar Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sub Dimensi Smart Governance.....	12
Tabel 1. 2 Sub Dimensi Smart Branding.....	14
Tabel 1. 3 Sub Dimensi Smart Economy	16
Tabel 1. 4 Sub Dimensi Smart Living	18
Tabel 1. 5 Sub Dimensi Smart Society.....	19
Tabel 1. 6 Sub Dimensi Smart Environment	21
Tabel 1. 7 Indikator SNI Dimensi dan Sub Dimensi Smart City	24
Tabel 2.1. Sub-Dimensi, Sasaran, dan Dasar Pemikiran Smart City.....	31
Tabel 2.2. Misi dan Indikator Smart City.....	34
Tabel 3.1. Strategi Smart Governance	36
Tabel 3.2. Strategi Smart Branding	37
Tabel 3.3. Strategi Smart Economy.....	38
Tabel 3.4. Strategi Smart Living	39
Tabel 3.5. Strategi Smart Society	40
Tabel 3.6. Strategi Smart Environment.....	41

1. BAB I PENDAHULUAN

Buku Masterplan *Smart City* pada bab 1 menyajikan latar belakang, informasi, serta alasan disusunnya Masterplan *Smart City* Kota Palopo. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan serta landasan kebijakan, regulasi, rujukan hukum, dan dokumen pendukung lain yang digunakan dalam penyusunan dokumen *Smart City* Kota Palopo. Pada bab ini juga menjelaskan tentang hubungan antara buku Masterplan *Smart City* dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dokumen masterplan atau perencanaan lainnya.

1.1 Latar Belakang

Kota Palopo terletak antara 2°53'.15" - 3°04'.08" Lintang Selatan dan 120°03'.10" - 120°14'.34" Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah Timur dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah Selatan serta Kabupaten Luwu di sebelah Barat. Kota Palopo memiliki potensi cukup beragam karena wilayah Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Potensi ini menjadi modal pembangunan melalui berbagai program pemerintah daerah yang mengacu pada dokumen RPJPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dengan visi: "Mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di Indonesia yang berkearifan lokal dan religi, serta nyaman dan produktif untuk semua".

Program pembangunan Kota Palopo lebih rinci juga diatur dalam RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan visi: Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan. Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya. Guna mewujudkan visi pembangunan Kota Palopo tersebut, selain melalui misi

dalam RPJPD maupun RPJMD daerah, juga diperlukan upaya akselerator pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya yang telah dipetakan dalam dokumen tersebut. Salah satu upayanya adalah melalui penerapan konsep *Smart City*. *Smart City* ini merupakan konsep cerdas yang diimplementasikan pada suatu wilayah geografi yang menerapkan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui partisipasi untuk pembangunan dan kesejahteraan yang diatur dalam suatu kebijakan dan peraturan.

Smart City dikenal juga sebagai salah satu konsep mengedepankan inovasi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan suatu wilayah menggunakan bantuan teknologi. Transformasi digital dan perkembangan pembangunan saat ini telah mengarahkan pada adanya pemenuhan kebutuhan pengelolaan daerah melalui konsep kota atau kabupaten cerdas (*Smart City*). Pada tahun 2017 di Indonesia telah dilakukan program Gerakan Mewujudkan 100 *Smart City* (kabupaten/kota) yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informasi dan didukung Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kantor Staf Kepresidenan, serta tentu saja para kolega pemerintahan di daerah. Pengembangan *smart city* di masing-masing lokalitas ini bukan dengan menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir, namun lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Berdasarkan hal tersebut maka berbagai program pembangunan pemerintah Kota Palopo yang dioptimalkan dengan konsep *Smart City* diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan Kota Palopo.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo adalah:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kota Palopo;
2. Untuk memberikan arahan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu menuju ke arah *Smart City*;

3. Untuk mendorong Kota Palopo dalam melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* secara efektif dan efisien; dan
4. Menjadikan Kota Palopo yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga.

1.3 Landasan Hukum

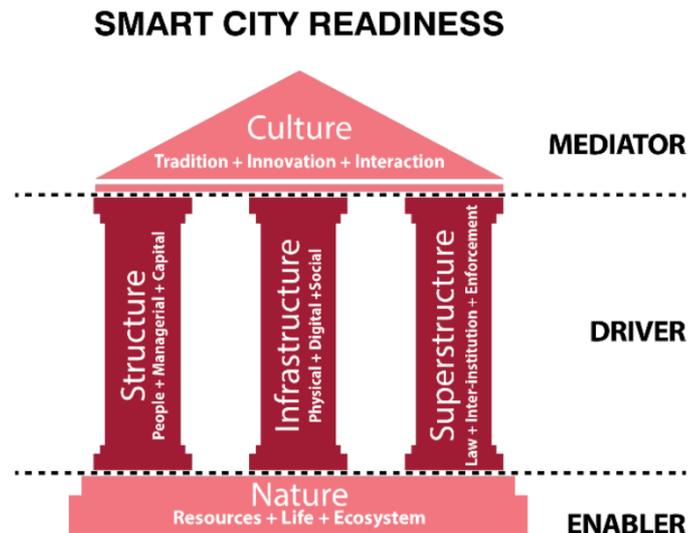
Landasan hukum dari penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo adalah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palopo

14. Peraturan Daerah Kota Palopo. Nomor 8 Tahun 2021. Tentang. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Palopo
16. Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo.
17. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 247 / VI / 2022 tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo
18. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 248 / VI / 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo

1.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir *Smart City* Kota Palopo disusun berdasarkan Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City – Gerakan Menuju 100 Smart City yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Smart City* dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Kota Pintar karena kata pintar menunjukkan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan kata cerdas, namun istilah Kota Cerdas seringkali juga dipergunakan untuk merujuk pada konsep *Smart City*. Istilah *Smart City* ini dalam implementasinya diberikan pada kabupaten/kota yang telah memiliki kesiapan daerah pintar/*Smart City Readiness*. Kesiapan daerah yang ditujukan untuk menjadi Daerah Pintar atau *Smart City Readiness* diukur berdasarkan lima aspek utama, seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



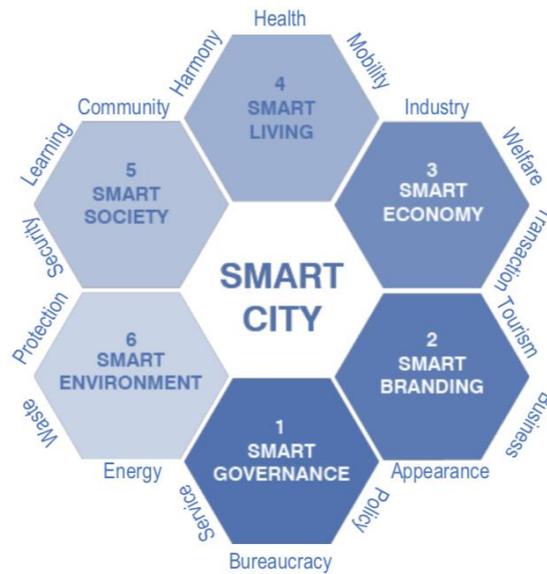
Gambar 1.1. Dimensi *Smart City*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Lima aspek utama yang menjadi ukuran atas kesiapan daerah pintar, yaitu: potensi alam (*nature*), struktur daerah (*struktural*), infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*superstructure*), dan budaya (*culture*). Adapun Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City

Kerangka berikutnya adalah enam dimensi yang perlu ada dalam *Smart City*, yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart society*, *smart living* dan *smart environment* seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut.



Gambar 1.2. Dimensi Smart City

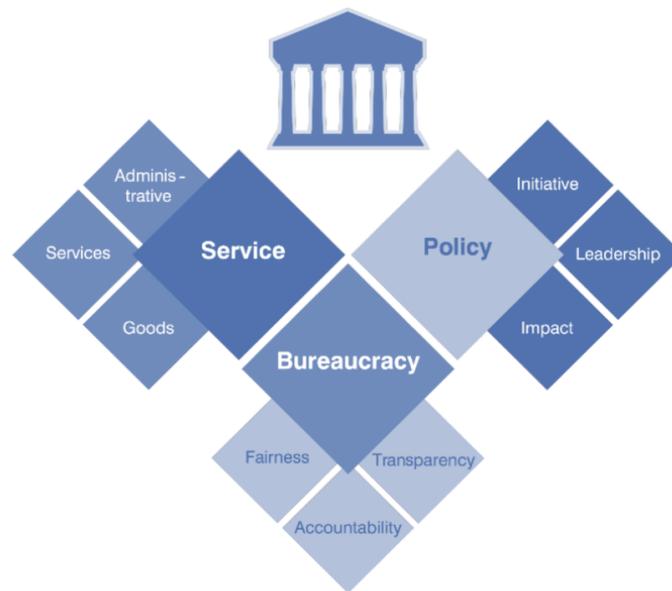
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Masing-masing dari dimensi *Smart City* memiliki 3 sub-dimensi seperti yang akan dijelaskan pada sub-bab berikut:

a. *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur antara lain yaitu: Pelayanan publik (*service*); Manajemen birokrasi yang efisien (*bureaucracy*); Efisiensi kebijakan publik (*policy*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.3 sebagai berikut.

SMART GOVERNANCE



Gambar 1.3. Smart Governance

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Governance* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 1 Sub Dimensi *Smart Governance*

Smart Governance	
Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. • Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain. • Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain
Manajemen Birokrasi yang Efsien (<i>Bureaucracy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-

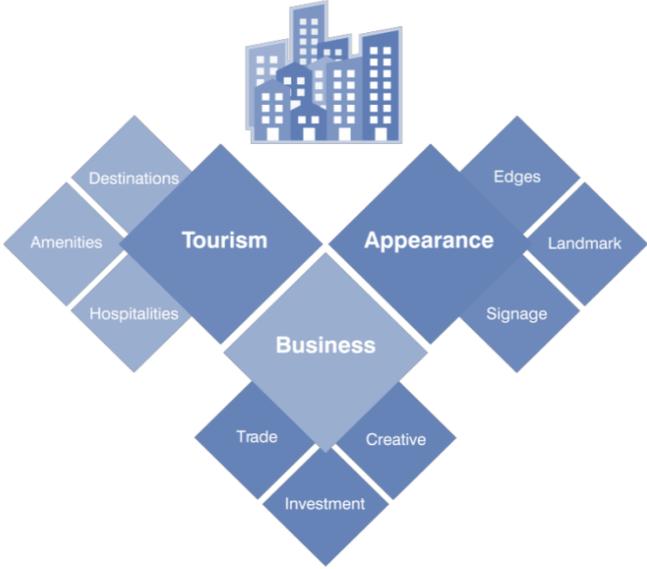
	<p>gov harus diarahkan menuju integrated & inter-operability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “City Operation Center (COC)”.</p>
<p>Efisiensi Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. • Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Sumber: Kemenkominfo, 2021

b. Smart Branding

Smart branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun unsur *smart branding* meliputi tiga hal yaitu: Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*); Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*); Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.4 sebagai berikut.

SMART BRANDING



Gambar 1.4. Smart Branding

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Branding* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 2 Sub Dimensi *Smart Branding*

Smart Branding	
Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (<i>destination</i>). • Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (<i>amenities</i>) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain. • Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (<i>hospitality</i>) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan <i>tour-guide</i> dan lain-lain.
Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya <i>market place</i> daerah. • Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya <i>Investment Lounge</i>, <i>Dashboard</i>, dan Portal Investasi Daerah.

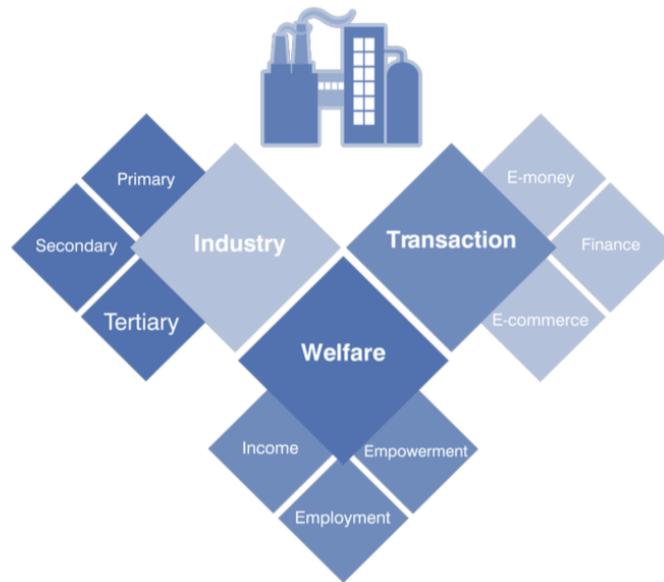
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, <i>fashion</i>, digital, dan lain-lain
Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional. • Membangun batas wilayah (<i>edge</i>), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (<i>landmark</i>), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (<i>signage</i>), struktur jalan yang teratur (<i>path</i>), dan titik simpul kota (<i>node</i>) seperti alun- alun, simpang dan lain-lain.

Sumber: Kemenkominfo, 2021

c. Smart Economy

Smart economy dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Tiga unsur dalam *smart economy* meliputi: Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*); Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*); Membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.5 sebagai berikut.

SMART ECONOMY



Gambar 1.5. Smart Economy

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Economy* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 3 Sub Dimensi *Smart Economy*

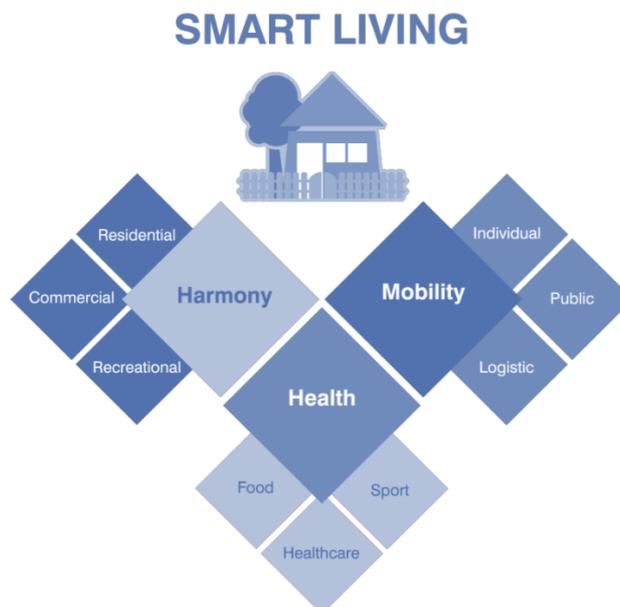
Smart Economy	
Membangun ekosistem industri yang berdayasaing (<i>industry</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Membangun daya saing industri daerah pada <i>leading sector</i> industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain- lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, <i>packaging</i> dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (<i>Welfare</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (<i>income</i>) Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (<i>employment</i>) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (<i>empowerment</i>)

Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash • Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan • Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place.
---	---

Sumber: Kemenkominfo, 2022

d. Smart Living

Smart living dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*. Sasaran dari *smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. *Smart living* terdiri atas tiga indikator yaitu: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*); Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*); Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.6 sebagai berikut



Gambar 1.6. Smart Living

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Living* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

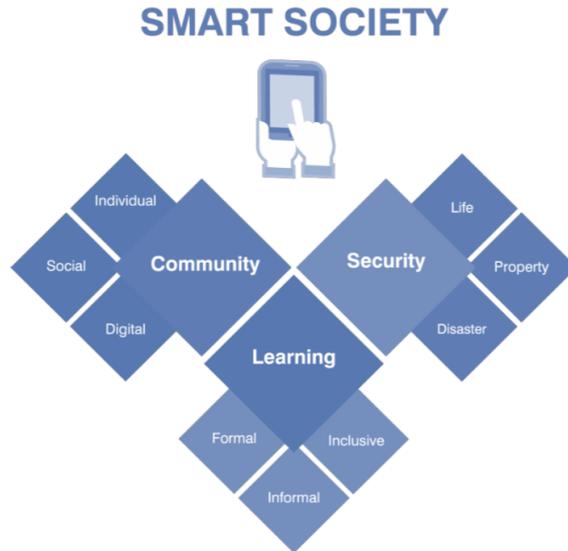
Tabel 1. 4 Sub Dimensi *Smart Living*

<i>Smart Living</i>	
Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (<i>residential</i>), lingkungan pusat kegiatan bisnis (<i>commercial</i>) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (<i>recreational</i>)
Mewujudkan Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (<i>food</i>), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (<i>healthcare</i>), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (<i>sport</i>).
Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (<i>mobility</i>) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Sumber: Kemenkominfo, 2021

e. *Smart Society*

Smart society merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis yang memungkinkan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Tiga elemen unsur di dalam *smart society*, yaitu: Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*); Membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*); Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.7 sebagai berikut.



Gambar 1.7. Smart Society

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Society* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

Tabel 1. 5 Sub Dimensi *Smart Society*

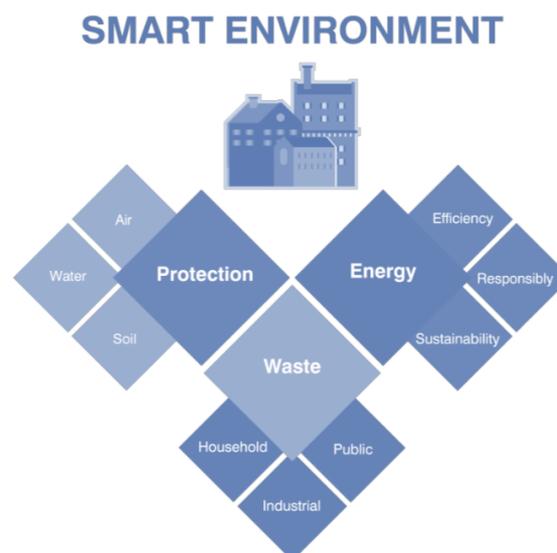
Smart Society	
Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (<i>Community</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain. • Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang <i>market place</i> dan lain-lain
Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (<i>Learning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang difable.

	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya <i>smart school, smart campus, smart pesantren, smart training</i> program dan lain-lain
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT).

Sumber: Kemenkominfo, 2022

f. Smart Environment

Smart environment merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran dari *smart environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Adapun unsur dalam *smart environment* yaitu: Mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*); Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*); Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (*energy*) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.8 sebagai berikut.



Gambar 1.8. Smart Environment

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Penjelasan dari masing-masing sub-dimensi pada *Smart Environment* dapat dilihat pada deskripsi berikut:

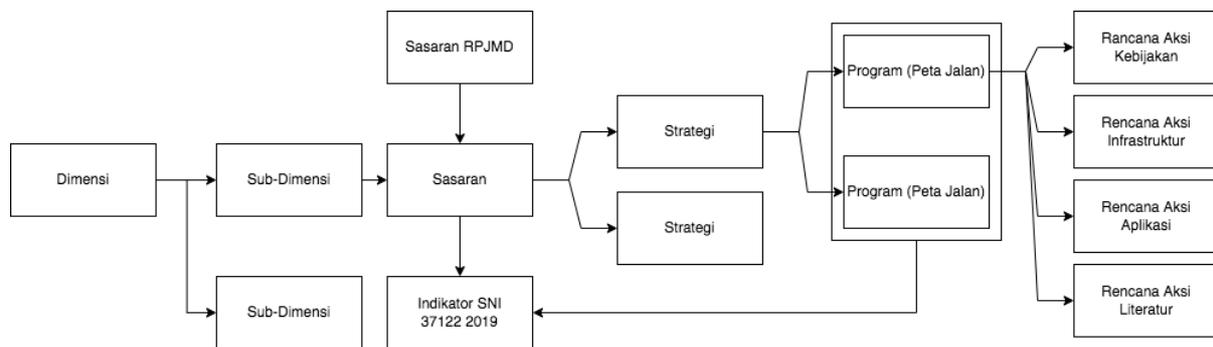
Tabel 1. 6 Sub Dimensi *Smart Environment*

Smart Environment	
Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT). • Membangun ruang terbuka hijau • Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi • Mengendalikan polusi udara
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (<i>Waste</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (<i>household</i>) • Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (<i>industrial</i>) • Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>) • Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab
Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (<i>Energy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab • Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

Sumber: Kemenkominfo, 2021

Penyusunan Masterplan *Smart City* Kota Palopo disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan seperti RPJMD, Renstra OPD, dan dokumen perencanaan lainnya. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan *Smart City* dibuat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah termasuk RPJPD dan RPJMD daerah. Pada dokumen RPJMD hubungan

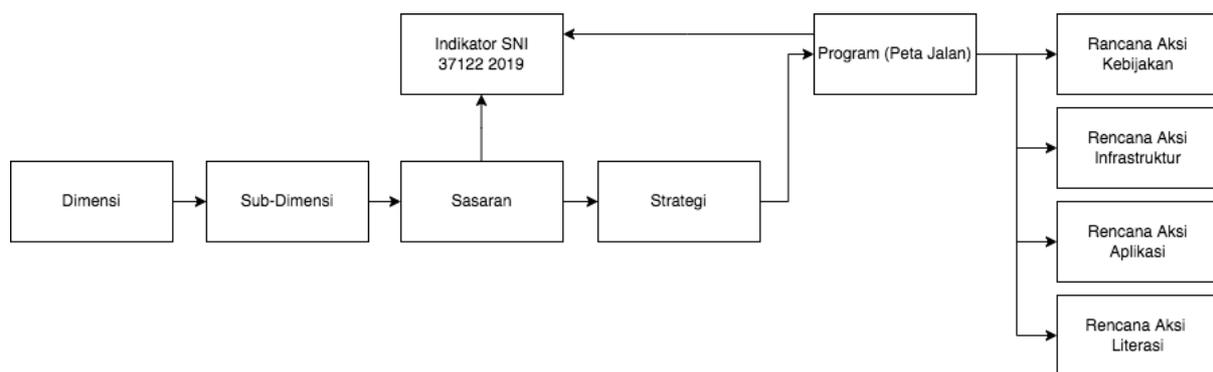
keterkaitan antara Masterplan *Smart City* dan RPJMD terletak pada tingkat sasaran, yaitu sasaran *Smart City* dan sasaran RPJMD. Lebih jauh, sasaran *Smart City* perlu dicapai melalui serangkaian strategi dan program *Smart City*, baik program pada Peta Jalan *Smart City*, maupun program pada rencana aksi pembangunan *Smart City* seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.9 sebagai berikut .



Gambar 1.9. Kerangka Keterkaitan antara Sasaran *Smart City* dengan RPJMD

Sumber: Kemenkominfo, 2021

Di samping itu, untuk memudahkan dalam penyajian sasaran, strategi dan program-program *Smart City* di dalam Masterplan, maka dapat disusun kodifikasi pada masterplan *Smart City* mulai dari dimensi *Smart City* dan sub-dimensi *Smart City* sebagaimana relasinya dapat dilihat pada Gambar 1.10 di bawah ini.



Gambar 1.10. Kerangka Kodifikasi Program *Smart City*

Sumber: Kemenkominfo, 2021

Penyusunan Visi Misi Masterplan *Smart City* Kota Palopo didasarkan pada Visi Misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2021-2026. Ditinjau berdasarkan

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), penyusunan Masterplan *Smart City* tersirat dalam tujuan nomor 17 yaitu *sustainable cities and communities* serta tertuang dalam indikator perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan SNI ISO 37122:2019. *Smart City* dalam hubungannya dengan ISO 37122, dimaksudkan untuk memberikan berbagai indikator dalam mengukur kemajuan ke arah kota pintar. Untuk menjamin implementasi dan keberlanjutan program *Smart City* yang diusulkan, program *Smart City* disesuaikan dengan rencana strategis (Renstra) OPD. Selain itu, dalam analisis kesiapan daerah terutama aspek infrastruktur fisik dan digital, Masterplan *e- Government* menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dasar dalam penyusunan dokumen masterplan. Struktur acuan standar seperti pada gambar 1.11 sebagai berikut.



Gambar 1.11. Standar Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan

Sumber: Kemenkominfo, 2021

SNI ISO 37122:2019 merupakan standar pertama dalam SNI ISO 37120 “Pembangunan berkelanjutan masyarakat – Indikator untuk layanan perkotaan dan kualitas hidup”. Standar ini memperkenalkan dasar umum untuk pelaporan, perbandingan dan tolok ukur kinerja. SNI ISO 37122:2019 menentukan dan menetapkan definisi dan metodologi untuk serangkaian indikator untuk kota cerdas. Mempercepat perbaikan pelayanan dan kualitas hidup merupakan bagian penting dalam definisi kota cerdas. Adapun dokumen ini, dalam hubungannya dengan ISO 37120, dimaksudkan untuk memberikan satu set lengkap berbagai indikator untuk mengukur kemajuan ke arah kota pintar.

Tujuan Dokumen SNI ISO 37122:2019 antara lain adalah:

1. Menggunakan informasi data dan teknologi modern untuk memberikan layanan dan kualitas hidup yang lebih baik kepada mereka yang berada di kota (penduduk, bisnis, pengunjung);
2. Menyediakan lingkungan hidup yang lebih baik di mana kebijakan, praktik, dan teknologi yang cerdas digunakan untuk melayani warga negara;
3. Mencapai tujuan keberlanjutan dan lingkungan mereka dengan cara yang lebih inovatif;
4. Mengidentifikasi kebutuhan dan manfaat infrastruktur pintar;
5. Memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan;
6. Membangun ekonomi yang dinamis dan inovatif yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Tabel 1. 7 Indikator SNI Dimensi dan Sub Dimensi *Smart City*

Sub dimensi	Indikator SNI
Smart Governnave	
Layanan Publik	SNI 10. Pemerintahan 10.1 Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk 10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 10.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	SNI 18. Telekomunikasi 18.1 Persentase populasi kota dengan akses ke pta lebar (broadband) berkecepatan memadai 18.2 Persentase area kota yang dicakup oleh kobnektivitas internet yang disediakan oleh kota 10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota
	SNI 5. Ekonomi 5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka
Manajemen Birokrasi	SNI 21. Perencanaan Kota 21.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan. 21.2 Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik. 22.3 Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari). 22.4 Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi.

Sub dimensi	Indikator SNI
Efisiensi Kebijakan Publik	-
Smart Branding	
Pariwisata	SNI 14. Rekreasi 14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring SNI 17 b. Budaya 17b.1 Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.0000 17b.2 Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan
Business Branding	-
Wajah Kota	-
Smart Economy	
Industri Berdaya Saing	SNI 20. Pertanian perkotaan / lokal dan ketangguhan pangan 20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan. 20.2 Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton). 20.3 Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring.
Kesejahteraan Masyarakat	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk. 5.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 5.4 Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan.
Transaksi Keuangan	SNI 9. Keuangan 9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri. 9.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik.
Smart Living	
Harmonisasi Tata Ruang	SNI 12. Perumahan 12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar. 12.2 Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar.
Kesehatan	SNI 11. Kesehatan 11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan. 11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk. 11.3 Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real time) untuk saran kualitas udara dan air.
Transportasi	SNI 19. Transportasi 19.1 Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real time). 19.2 Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk.

Sub dimensi	Indikator SNI
	<p>19.3 Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi.</p> <p>19.4 Jumlah sepeda yang tersedia melalui layanan berbagi sepeda yang disediakan oleh kota per 100.000 penduduk.</p> <p>19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.</p> <p>19.6 Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu.</p> <p>19.7 Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik.</p> <p>Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan parkir langsung (<i>real time</i>).</p> <p>19.8 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas.</p> <p>19.9 Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (<i>real time</i>) sebagai persentase dari total luas kota.</p> <p>19.10 Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan otonom (<i>autonomous</i>).</p> <p>19.11 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komputer.</p> <p>19.12 Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom.</p> <p>19.3 Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor.</p>
Smart Society	
Interaksi Masyarakat	<p>SNI 13. Populasi dan Kondisi Sosial</p> <p>13.1 Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus.</p> <p>13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.</p> <p>13.3 Persentase penyeberangan pejalan kaki yang ditandai dilengkapi dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses</p> <p>13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital.</p>
Ekosistem Belajar yang efisien	<p>SNI 6. Pendidikan</p> <p>16.1 Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa.</p> <p>16.2 Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa.</p> <p>16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.</p>
	<p>SNI 17.a. Olahraga</p> <p>17.1 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul <i>e-book</i> per 100.000 penduduk.</p> <p>17.2 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif.</p>
Keamanan	SNI Keamanan

Sub dimensi	Indikator SNI
	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital.
Smart Environment	
Proteksi Lingkungan	<p>SNI 22. Air Limbah</p> <p>22.1 Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali.</p> <p>22.2 Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering).</p> <p>22.3 Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota.</p> <p>22.4 Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi.</p> <p>22.5 Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh sistem sensor data <i>tracking real time</i>.</p> <hr/> <p>SNI 23. Air</p> <p>23.1 Persentase air minum yang dilacak oleh stasiun pemantauan kualitas air langsung (<i>real time</i>).</p> <p>23.2 Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (<i>real time</i>) per 100.000 populasi.</p> <p>23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem.</p> <p>23.5 Persentase bangunan di perkotaan dengan meteran air cerdas.</p>
Tata Kelola Sampah dan Limbah	<p>SNI 16. Limbah Padat</p> <p>10.Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering.</p> <p>11.Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.</p> <p>12.Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi.</p> <p>13.Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota.</p> <p>14.Persentase tempat sampah umum yang difungsikan dengan sensor.</p> <p>15.Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang.</p> <hr/> <p>SNI Lingkungan dan Perubahan Iklim</p> <p>16.Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau.</p> <p>17.Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (<i>real time</i>) per kilometer persegi (km²)</p> <p>18.Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan.</p>
Tata Kelola Energi	<p>SNI 7. Energi</p> <p>7.1 Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu.</p> <p>7.2 Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun.</p> <p>7.3 Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun.</p>

Sub dimensi	Indikator SNI
	<p>7.4 Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi.</p> <p>7.5 Kapasitas penyimpanan jaringan energi kota per total konsumsi energi kota.</p> <p>7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.</p> <p>7.8 Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang.</p> <p>7.9 Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan.</p> <p>7.10 Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas.</p> <p>7.11 Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar.</p>

2 BAB II ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY

Arah Pembangunan Smart City pada Bab II disusun untuk mengidentifikasi indikator utama dalam *Smart City* Kota Palopo yang disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* yang sudah dirumuskan sebelumnya. Indikator utama *Smart City* dianalisis untuk setiap masing-masing sub dimensi dalam mencapai tujuan *Smart City* Kota Palopo.

2.1 Visi, Misi, dan Sasaran Smart City Daerah

Visi, Misi dan Sasaran *Smart City* Daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis strategi pembangunan melalui analisis SWOT. Analisis Visi Pembangunan *Smart City* bertujuan untuk menyelaraskan visi misi pembangunan daerah termasuk RPJP dan RPJMD daerah dengan Visi Misi *Smart City* yang akan disusun. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh Visi *Smart City* Kota Palopo berupa:

“PALOPO KOTA KEBERSAMAAN”

Kota Palopo yang “Kolaboratif”, “Edukatif”, “Berbudaya”, “Empati”, “Religius”, “Sehat”, “Aman”, “Maju”, “Akseleratif”, “Adaptif”, dan “Nyaman”

"Kebersamaan" memiliki makna bahwa Kota Palopo dibangun dan dikembangkan dalam ikatan yang didasari oleh nilai kekeluargaan dan persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional, tetapi memiliki visi, kepedulian, kerendahan hati, dan mendahulukan kepentingan bersama. Adapun penjabaran makna dari Visi *Smart City* Kota Palopo Kebersamaan adalah sebagai berikut :

- **Kolaboratif:** Kota yang mengedepankan konsep kerja sama yang dinamis, dialogis, namun tetap harmonis untuk mencapai kondisi yang lebih baik
- **Edukatif:** Kota yang mampu memberikan dan menyediakan pendidikan berdaya saing, memberi ruang bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan menjamin pengembangan potensi.
- **Berbudaya:** Kota yang dikembangkan dengan melestarikan warisan budaya.

- **Empati:** Kota yang penyelenggaraan layanan pemerintahan dan dinamika kehidupan sosial dilaksanakan berdasarkan bela rasa dan saling peduli dalam kerangka solidaritas.
- **Religius:** Kota yang meletakkan kepatuhan terhadap ke-Tuhan-an, dan implementasi nilai sosial, moral, norma, etika, tradisi, kearifan lokal dan toleransi sebagai fondasi kehidupan.
- **Sehat:** Kota yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, dan berupaya menyediakan dimensi permukiman, lalu lintas dan transportasi, industri, perkantoran dan pariwisata yang sehat.
- **Aman:** Kota yang memberikan jaminan perlindungan, keselamatan, dan kebebasan dari segala bentuk ancaman mental maupun spiritual
- **Maju:** Kota yang menempatkan aspek kemudahan, kecepatan, keteraksesan dan kualitas layanan sebagai dimensi utama pada semua aspek.
- **Akseleratif:** Kota yang selalu berupaya mempercepat, mengembangkan potensi dan kondisi ke arah yang lebih baik melalui sikap kreatif dan inovatif
- **Adaptif:** Kota yang mengimplementasikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman
- **Nyaman:** Kota yang menyediakan lingkungan dan dinamika kehidupan perkotaan yang terbuka, keramah-tamahan, dan menghormati pluralisme,

Berdasarkan Visi *Smart City* Kota Palopo tersebut, untuk memperjelas dalam pelaksanaan mewujudkan visi *Smart City*, diturunkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih rinci melalui Misi *Smart City*. Penekanan misi *Smart City* Kota Palopo yang ditekankan pada visi yakni “Kota Palopo yang “Kolaboratif”, “Edukatif”, “Bersih”, “Empati”, “Religius”, “Sehat”, “Aman”, “Maju”, “Akseleratif”, “Akuntabel”, dan “Nyaman”. Adapun misi *Smart City* Kota Palopo antara lain:

- Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi.

- Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebijakan pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi.
- Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan dengan berbasis pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya
- Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan konektivitas sistem pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi.

Visi Misi *Smart City* Kota Palopo tersebut menjadi acuan dalam penyusunan sasaran *Smart City* Kota Palopo yang merupakan rangkaian indikator keberhasilan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi pelaksanaan *Smart City*. Adapun sasaran *Smart City* Kota Palopo, yaitu:

Tabel 2.1. Sub-Dimensi, Sasaran, dan Dasar Pemikiran Smart City

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
<i>Smart Governance</i>	Layanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengembangan sistem pelayanan terpusat,	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
	Birokrasi	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah
	Perancangan Kebijakan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan	Indeks Pembangunan Manusia
<i>Smart Branding</i>	Pariwisata	Meningkatnya aktivitas pariwisata Terutama melalui kegiatan pariwisata budaya, pendidikan, dan kesehatan,	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
	Daya Saing Bisnis	Industri pariwisata	Jumlah UKM Jumlah kunjungan wisatawan
	Wajah Kota	Pengembangan destinasi taman kota, terutama kawasan	Persentase ruang terbuka hijau Persentase rumah layak huni
<i>Smart Economy</i>	Ekosistem Industri	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
	Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat. Ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indikator Angka Kemiskinan Indeks Gini
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas melalui: Pelayanan transaksi elektronik pada bidang administrasi publik, pendidikan, dan kesehatan Pengembangan sarana prasarana transaksi di wilayah destinasi taman kota	Produktivitas total daerah Kontribusi PAD
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan. Taman kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik
	Kesehatan	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Pelayanan dan wisata Kesehatan	Indeks Kesehatan
	Transportasi	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategis daerah. Akses pendukung destinasi wisata budaya, pendidikan, dan kesehatan	Indeks Aksesibilitas Wilayah
<i>Smart Society</i>	Interaksi Masyarakat	Pengembangan taman kota tematik sesuai sasaran kelompok masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	Ekosistem Belajar/Pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
	Keamanan Masyarakat	Jaminan keamanan aktivitas wisata	Angka kriminalitas
<i>Smart Environment</i>	Proteksi Lingkungan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup Keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau publik melalui taman kota	Persentase ruang terbuka hijau publik

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Pengelolaan sampah dan limbah pendukung pengembangan destinasi wisata taman kota	Persentase jumlah sampah dikelola
	Tata Kelola Energi	Penggunaan teknologi terbarukan pada ruang publik	Jumlah penggunaan teknologi terbarukan

2.2. Indikator Utama Smart City

Perwujudan *Smart City* Kota Palopo dirumuskan dalam 4 misi *Smart City* Kota Palopo yang mendukungnya dan dapat dicapai melalui enam sub-dimensi *Smart City* yang menjadi indikator utama *Smart City*, yaitu: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Adapun masing-masing misi dengan indikator *Smart City* Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Misi dan Indikator Smart City

Misi Smart City	Indikator Smart City
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi.	Misi 1 <i>Smart City</i> Kota Palopo diterjemahkan ke dalam indikator <i>Smart Governance</i> dan <i>Smart Branding</i> yang dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pembangunan daerah melalui pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan komunikasi
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebijakan pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi.	Misi 2 <i>Smart City</i> Kota Palopo diterjemahkan ke dalam indikator <i>Smart Living</i> dan <i>Smart Environment</i> yang dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi.
Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan dengan berbasis pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya	Misi 2 <i>Smart City</i> Kota Palopo diterjemahkan ke dalam indikator <i>Smart Economy</i> yang dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan melalui pengoptimalan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya
Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas,	Misi 2 <i>Smart City</i> Kota Palopo diterjemahkan ke dalam indikator <i>Smart Society</i> yang

Misi Smart City	Indikator Smart City
dan konektivitas sistem pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi.	dimaksudkan untuk mewujudkan ketersediaan pelayanan dasar melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan konektivitas sistem pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi.

3 BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Bab III Strategi Pembangunan *Smart City* disusun berdasarkan hasil analisis strategi *Smart City* Kota Palopo yang dianalisis berdasarkan hasil analisis kesenjangan (GAP), SWOT, dan TOWS. Strategi pembangunan *Smart City* digunakan sebagai salah satu langkah dalam mencapai Visi Misi *Smart City* Kota Palopo melalui penyusunan strategi yang ada berdasarkan masing-masing dimensi yang kemudian dirinci menjadi masing-masing sub dimensi

3.1 *Smart Governance*

Smart Governance merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efisien, efektif dan terintegrasi. Beberapa sub- dimensi yang ada berupa layanan publik (*public services*), birokrasi (*bureaucracy*), dan perancangan kebijakan (*policy design*). Adapun dalam pembangunan *Smart City* Kota Palopo, Strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada dimensi ini difokuskan pada pengembangan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Governance* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. *Stategi Smart Governance*

Sub-Dimensi	Strategi
Layanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pelayanan masyarakat berbasis teknologi dan media digital.• Peningkatan aksesibilitas data dan informasi melalui pengembangan sistem pengelolaan data terpusat
Birokrasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem pengawasan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah• Pengembangan sistem koordinasi pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sub-Dimensi	Strategi
Perancangan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem koordinasi perancangan kebijakan pemerintah daerah • Pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi perancangan kebijakan pemerintah daerah

3.2 Smart Branding

Smart Branding merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu membangun citra Kota Palopo, terutama sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di Indonesia yang berkearifan lokal dan religi, serta nyaman dan produktif untuk semua, sesuai dengan visi dalam RPJPD Kota Palopo. *Smart Branding* masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang pertama. Sub-dimensi yang ada pada *Smart Branding* adalah pariwisata (*tourist*), daya saing bisnis (*Business Competitiveness*), dan wajah (tampilan) kota (*Face of The City*). Adapun strategi dan arah kebijakan *Smart City* Kota Palopo difokuskan pada Peningkatan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Branding* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Strategi Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan pariwisata Kota Palopo melalui teknologi informasi dan media digital. • Peningkatan aksesibilitas data dan informasi bidang Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai bidang unggulan Kota Palopo
Daya Saing Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem informasi pelayanan investasi bisnis di Kota Palopo • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui pengembangan sistem koordinasi pelaku usaha kecil menengah Kota Palopo

Wajah Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan citra Kota Palopo sebagai Kota Tua / Kota Pusaka • Peningkatan ruang publik Kota Palopo melalui pengembangan destinasi taman kota
------------	--

3.3 Smart Economy

Smart Economy merupakan salah satu dimensi dalam konsep *Smart City* yang bertujuan untuk bidang usaha masyarakat sehingga mampu beradaptasi sesuai tantangan di era informasi dengan cara yang cerdas. Dimensi *Smart Economy* masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang ketiga. Terdapat 3 sub dimensi pada *Smart Economy*, yaitu: ekosistem industri (*industry*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan ekosistem transaksi keuangan (*transaction*). Adapun strategi pada dimensi *Smart Economy* ini difokuskan untuk Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan, serta mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Economy* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Strategi Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi
Ekosistem Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan akses data dan informasi investasi guna mendorong perluasan kesempatan berusaha • Pengembangan sistem koordinasi guna peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.
Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem koordinasi peningkatan usaha kecil menengah guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. • Pengembangan akses data dan informasi ekonomi kreatif guna mendorong peningkatan kesempatan kerja

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan akses data dan informasi pendidikan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
Ekosistem Transaksi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan transaksi keuangan, terutama pada bidang administrasi publik, pendidikan, dan Kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital

3.4 Smart Living

Smart living merupakan salah satu dimensi *Smart City* yang digunakan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat melalui sub dimensi dalam *Smart Living*. Terdapat tiga sub dimensi dalam *Smart Living* yaitu: kelayakan pola hidup (*harmony*), kelayakan kualitas kesehatan (*health*), dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di suatu daerah (*mobility*). Dimensi *Smart Living* ini masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang kedua, yaitu mendorong pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi. Strategi dalam *Smart Living* ini terutama ditujukan untuk Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerja sama daerah sehingga dapat terwujud visi yang dibentuk. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Living* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Strategi Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi penataan ruang daerah • Pembentukan sistem koordinasi dan informasi pengembangan penataan ruang daerah
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses data dan informasi kesehatan pemanfaatan teknologi informasi dan media digital

	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan Kesehatan melalui pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan daerah
Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur penunjang peningkatan angka kunjungan Kota Palopo • Pengembangan sistem informasi pelayanan transportasi daerah

3.5 Smart Society

Smart Society merupakan salah satu dalam dimensi *Smart City* yang digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan lingkungan masyarakat yang cerdas. Dimensi *Smart Society* ini masuk dalam misi *Smart City* Kota Palopo yang ke empat dengan tersedianya pelayanan dasar melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan konektivitas sistem pelayanan publik sehingga terbentuk sumber daya manusia yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat digunakan Sub Dimensi dalam Smart Society, yaitu: komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*). Strategi dalam dimensi *Smart Society* ini khususnya difokuskan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Society* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Strategi Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi
Interaksi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur ruang publik melalui pengembangan taman kota • Peningkatan akses data dan informasi komunitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital
Ekosistem Belajar/Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ruang belajar masyarakat melalui pengembangan komunitas

	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital
Keamanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan keamanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital • Pengembangan sistem koordinasi antar lembaga pelayanan keamanan masyarakat

3.6 Smart Environment

Smart Environment merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan untuk mendorong terwujudnya keseimbangan ekosistem guna kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat dengan menjaga kualitas lingkungan. Dimensi *smart environment* masuk ke dalam misi *Smart City* yang kedua, yaitu mendorong pembangunan yang holistik dan jangka panjang dengan berprinsip pada nilai-nilai pelestarian alam dan budaya, pemerataan kesejahteraan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam *Smart Environment* digunakan tiga sub dimensi, yaitu proteksi lingkungan (*Environmental Protection*), pengelolaan sampah dan limbah (*Waste Management*). Adapun strategi dalam *Smart Environment* Kota Palopo difokuskan untuk meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada masing-masing sub dimensi *Smart Environment* strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Strategi Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi
Proteksi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem koordinasi pengawasan dan evaluasi perlindungan lingkungan Kota Palopo • Peningkatan aksesibilitas data dan informasi perlindungan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital • Peningkatan perlindungan lingkungan melalui pengembangan taman kota

Pengelolaan Sampah dan Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan sampah dan limbah Kota Palopo• Pengembangan edukasi pengelolaan sampah dan limbah melalui pengembangan destinasi wisata taman kota
Tata Kelola Energi	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi sarana prasarana tata kelola energi pada fasilitas publik

4 BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH

Rencana aksi merupakan tahapan yang akan dilakukan untuk terwujudnya visi misi *Smart City* Kota Palopo yang dirumuskan berdasarkan RPJMD Kota Palopo. Dalam melaksanakan rencana aksi *Smart City* dibutuhkan suprastruktur berupa kebijakan dan kelembagaan, infrastruktur jaringan dan data center, serta pengembangan aplikasi yang sesuai dengan potensi daerah dan tututan perkembangan teknologi.

4.1 Rencana Aksi Smart City Daerah

Rencana aksi terdapat 4 bagian yaitu Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengemangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*, serta Penguatan Literasi *Smart City* Daerah.

4.1.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program *Smart City* sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Adapun, kelembagaan merupakan perangkat non-fisik dari sisi pengelola kota yang bertujuan untuk mengatur pembagian peran dalam pelaksanaan *Smart City* Daerah. Rencana aksi dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan ini berperan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan *Smart City* di Kota Palopo. Adapun rencana aksi pengembangan kebijakan dan kelembagaan di Kota Palopo antara lain yaitu:

4.1.1.1 Kebijakan

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan Masterplan *Smart City* Kota Palopo seperti Perda Masterplan *Smart City*, Perda Dewan *Smart City*, Tim Pelaksana *Smart City*,
2. Penyusunan Program *quick wins* yang ditetapkan sesuai dengan urgensi permasalahan yang ada di Kota Palopo melalui berbagai kerjasama dan sinergitas berbagai *stakeholder*.
3. Penetapan kebijakan program *Smart City* yang disesuaikan dengan perencanaan anggaran tahunan guna menjamin pelaksanaan

4. Penetapan kebijakan yang menjamin keberlanjutan program *smart city*, yaitu: *smart governance, smart branding, smart living, smart economy, smart society* dan *smart environment* di Kota Palopo
5. Penetapan berbagai kebijakan pendukung dalam mencapai *Smart City* Kota Palopo yang meliputi penggunaan teknologi dan system informasi.
6. Penetapan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala dengan berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam Masterplan *Smart City* Kota Palopo

4.1.1.2 Kelembagaan

1. Pembentukan Dewan Smart City Daerah
2. Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Daerah
3. Pembentukan Forum Smart City Daerah
4. Pembentukan Tim Perencana dan Evaluator Kebijakan Pendukung Smart City
5. Pembentukan Tim Perencana dan Evaluator Aplikasi Pendukung Smart City
6. Pembentukan Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur Pendukung Smart City
7. Pembentukan Tim Penguatan Literasi Pendukung Smart City

4.1.2 Pengembangan Infrastruktur Pendukung

4.1.2.1 Pengembangan Infrastruktur Fisik

1. Penambahan jaringan publik internet hotspot;
2. Penyediaan *bandwidth* internet;
3. Pembangunan *command center*
4. Penyediaan listrik yang stabil dan terjamin suplainya 7x24 jam;
5. Pembangunan dan perbaikan jalan;
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah;
7. Pemerataan pembangunan infrastruktur fisik baik fasilitas umum, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah;
8. Pembangunan dan pengembangan amenities wisata; dan

9. Pembangunan dan pengembangan jalur transportasi antar wilayah seperti pengembangan bandara, pembangunan jembatan, terminal, pelabuhan, dan lain sebagainya

4.1.2.2 Pengembangan Infrastruktur Digital

1. Pemanfaatan Teknologi *Cloud Computing* (Komputasi Awan) sehingga pengembangan layanan-layanan TIK dapat memangkas waktu dan biaya untuk proses ketersediaan infrastruktur *server* dengan *Service Level Agreement (SLA)*. *Cloud Computing* mampu mewujudkan percepatan *e-Government*, memudahkan sharing informasi;
2. Perluasan dan penguatan akses jaringan internet di seluruh wilayah;
3. Pembangunan jaringan *fiber optic*;
4. Pengembangan *free hotspot* di area public;
5. Pengadaan *server* untuk aplikasi untuk menciptakan efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
6. Penyiapan *Disaster Recovery System* atau pemulihan sistem dari akibat bencana agar proses penanganan masalah

4.1.3 Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak

Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak menjadi salah satu sarana utama pendukung ketercapaian *Smart City*. Dalam pembangunan *Smart City* Kota Palopo, aplikasi dan perangkat lunak dalam bentuk sistem operasi server, *Tool Assessment*, *Data Warehouse*, Sistem Operasi Server, Aplikasi layanan online, Aplikasi, Website, Media sosial, Antivirus, Firewall, SSL, Domain dan Hosting yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan *Smart City* Kota Palopo seperti:

1. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pelayanan pemerintah yang mencakup sub dimensi *Smart Governance*, baik itu dalam penyajian informasi maupun dalam pelayanan transaksi dan penyediaan dokumen kependudukan
2. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan pariwisata Kota Palopo dan aspek lain yang mencakup sub-dimensi *Smart Branding*. Terutama yang mendukung pengembangan Kota Palopo sebagai kota kunjungan wisata Kesehatan, pendidikan, dan budaya.

3. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan aktivitas ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan yang mencakup sub-dimensi *Smart Economy*. Dalam aspek ini terutama untuk pengembangan kawasan industri dan ekonomu kreatif.
4. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan Kota Palopo sebagai kota yang nyaman dan aman serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup sub-dimensi *Smart Living* dan *Smart Society*.
5. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pengembangan Kota Palopo sebagai kota yang bersih, sehat dan hamonis dengan lingkungan yang mencakup sub-dimensi *Smart Environment*.

4.1.4 Penguatan Literasi

Penguatan literasi menjadi salah satu tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai pembangunan *Smart City* Kota Palopo. Melalui penguatan literasi maka pembangunan *Smart City* Kota Palopo dapat dicapai lebih cepat dan melibatkan lebih banyak pihak sehingga tidak ada yang ditinggalkan. Penguatan literasi Kota Palopo berkaitan erat dengan sub-dimensi *Smart City*, yaitu:

1. Penguatan literasi pelayanan pemerintah yang berkualitas dan transparan
2. Penguatan literasi *Smart City* sebagai kota kunjungan wisata Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.
3. Penguatan literasi pengembangan kawasan industri dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
4. Penguatan literasi pencapaian Kota Palopo yang religius sehat, aman, dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi informasi.
5. Penguatan literasi Kota Palopo

4.1 Rencana Aksi Smart City Setiap Dimensi

4.1.1 Rencana Aksi Smart Governance

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital	Program pengembangan sistem informasi pelayanan publik: Aplikasi akte kelahiran dan Kematian; dan Dashboard Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kota Palopo.	2022	Pengadaan server untuk mendukung / hosting aplikasi dan data akte kelahiran / kematian; Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi dan sistem dashboard	2023	Pengembangan aplikasi akte kelahiran dan kematian; Pengembangan sistem dashboard kependudukan dan capil	2023	Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial; Pendayagunaan komunitas untuk penyebaran program	2023	DUKCAPIL
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern oleh seluruh perangkat daerah melalui asistensi / pendampingan oleh Inspektorat	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan secara rutin dan berkala)	Pengembangan cakupan pelayanan Aplikasi E Audit	2024	Pengadaan ruang informasi dan pengembangan system pengawasan internal dan pengawasan kebijakan kepala daerah	2024	Maintenance aplikasi E Audit	2024	Rencana Pembuatan Peraturan walikota tentang penggunaan E Audit terintegrasi	2024	INSPEKTORAT
		Kegiatan Evaluasi dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan	Pengembangan cakupan pelayanan Aplikasi E Audit	2023	Penambahan kapasitas MBS, Penambahan SDM Operator tertentu, Pengadaan sarana prasarana, Maintenance	2023	Maintenance aplikasi E Audit	2023	Sosialisasi penggunaan aplikasi E Audit	2023	
Efisiensi Kebijakan Publik	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan	Penelitian dan pengembangan daerah	Penyusunan Rekomendasi hasil kelitbang bidang	2023	Data terkait bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan	2023	Aplikasi Sistem Penelitian pengembangan bidang sosial, ekonomi dan	2023	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	2023	BALITBANG

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	pengembangan serta inovasi		Sosial, Ekonomi dan pemerintahan				pemerintahan (database penelitian)		bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan		BALITBANG
			Penyusunan Rekomendasi hasil kelitbang bidang inovasi, pengembangan wilayah dan SDA	2023	Data terkait bidang inovasi. Pengembangan wilayah dan SDA	2023	Aplikasi Sistem Penelitian pengembangan bidang inovasi. Pengembangan wilayah dan SDA (Data base penelitian)	2023	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bidang inovasi. Pengembangan wilayah dan SDA	2023	
			Pengembangan Inovasi Daerah	2023	Data inovasi daerah pada SKPD se Kota Palopo	2023	Aplikasi e-Innovation (Database seluruh inovasi di SKPD)	2023	Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi daerah	2023	

4.1.2 Rencana Aksi Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
Pariwisata	Pengembangan Kota Palopo sebagai Kota Kunjungan Wisata Kesehatan, Pendidikan,	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	Aturan penyediaan dan usaha transportasi	2023	Pusat pelayanan dan sarana transportasi	2023	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	2023	Informasi kemudahan kunjungan wisata, pendidikan, kesehatan, kota bersejarah	2023	Dinas Pariwisata

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	dan Kota Pusaka										
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Peningkatan pelayanan pengembangan usaha	Portal peta investasi strategis Kota Palopo	Regulasi pengelolaan usaha dan investasi	2023	Sarana-prasarana pendukung kawasan strategis ekonomi	2023	Portal peta investasi strategis Kota Palopo	2023	Informasi kemudahan investasi usaha	2023	DPMPSTP
Membangun Wajah Kota	Pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan pariwisata berbasis masyarakat	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Parekraf Kota Kabupaten/Kota	Regulasi kewajiban muatan budaya lokal dalam arsitektur bangunan	2023	Sarana-prasarana informasi situs/bangunan bersejarah, dan Sarana ruang publik	2023	Aplikasi promosi, edukasi, dan market place	2023	Bangunan Berarsitektur khas Luwu	2023	Dinas PUPR (Bidang Tata Ruang)
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Forum kawasan Lalebbata (Pelibatan perusahaan, OPD, dan Masyarakat)	2023	Cagar Budaya yang sudah data dan di tetapkan	2023	Papan Informasi dan barcode cagar budaya	2023	Situs/bangunan bersejarah di kawasan lalebbata	2023	Dinas Kebudayaan

4.1.3 Rencana Aksi Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
Industri Berdaya Saing	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan aturan dan lembaga pengelolaan kawasan strategis industri	2023	Pengembangan fasilitas pendukung akses kawasan industri	2023	Portal informasi investasi usaha Kota Palopo	2023	Pengembangan kawasan industri daerah	2023	Dinas Perindustrian

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan aturan dan lembaga pengelolaan kawasan pariwisata	2023	Pengembangan fasilitas public dan amenitas pariwisata	2023	Pengembangan media sosial, website dan aplikasi pemasaran pariwisata	2023	Pelayanan dan produk pariwisata	2023	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyusunan aturan dan lembaga pengembangan usaha perikanan tangkap	2023	Pengembangan fasilitas pengolahan produk hasil usaha perikanan tangkap	2023	Portal informasi produk olahan usaha perikanan tangkap	2023	Pengembangan dan pemasaran produk perikanan	2023	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan aturan perlindungan kawasan dan produk pertanian	2023	Pengembangan fasilitas pengolahan produk hasil usaha pertanian	2023	Portal informasi produk usaha pertanian	2023	Pengembangan dan pemasaran produk pertanian	2023	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan system ketahanan pangan daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyusunan aturan Kerjasama pengembangan ketahanan pangan Kota Palopo	2023	Pengembangan industri pengolahan dan pengawetan produk pangan	2023	Portal informasi produk usaha pertanian dan perikanan	2023	Sistem ketahanan pangan daerah	2023	Dinas Sosial
Transaksi Keuangan	Peningkatan kualitas pelayanan transaksi elektronik	Program Perekonomian dan Pembangunan: Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Penyusunan aturan dan lembaga pengembangan standar pelayanan	2023	Pengembangan jaringan informasi dan ruang pelayanan daerah	2023	Aplikasi Pengelolaan Keuangan	2023	Pengelolaan dan transaksi keuangan elektronik	2023	Dinas Sosial
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro dan Kecil	Program pengembangan UMKM, Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Penguatan UMKM melalui fasilitasi permodalan dengan mitra Usaha (pihak perbankan melalui KUR dan BUMN melalui CSR)	2022	Taman promosi produk usaha mikro	2023	E-katalog UMKM	2023	Pelatihan & Pendampingan usaha mikro	2023	Dinas Koperasi dan UKM

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
			Pembinaan UMKM melalui pelatihan secara kelembagaan & usaha serta pendampingan usaha								
	Pengoptimalan Kualitas Koperasi	Program: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Kegiatan: Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	<p>Penguatan koperasi melalui fasilitasi permodalan dengan mitras Usaha</p> <p>Penguatan Koperasi melalui pelatihan dan pembinaan para pelaku usaha koperasi</p>	2022	Penyediaan ruang pelayanan pengembangan UMKM dan	2023	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	2023	Pelatihan & Pendampingan Koperasi	2023	

4.1.4 Rencana Aksi Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
Harmonisasi Lingkungan	Peningkatan Kesadaran lingkungan dan resiko bencana	Pelayanan penanggulangan bencana	Pembentukan forum masyarakat tanggap bencana	2023	<p>Pengadaan perangkat pendukung kebencanaan daerah</p> <p>Pengadaan sarana prasarana pengembangan komunitas tanggap bencana</p>	2023	<p>Sistem informasi kebencanaan daerah</p> <p>Media informasi masyarakat tanggap bencana</p>	2023	<p>Sosialisasi sistem informasi kebencanaan daerah</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM lembaga kebencanaan daerah</p>	2023	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan Landasan Hukum untuk pelaksanaan program kegiatan	2023	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan	2023	Sistem Listrik Pintar dan Sistem Air Pintar	2025	Monitoring dan Evaluasi Penghunian Perumahan	Tiap Tahun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
		Program Kawasan Permukiman	Penyusunan Landasan Hukum untuk pelaksanaan program kegiatan	2023	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	2023	Sistem Informasi RTLH dan Data Backlok terintegrasi	2023	Pengembangan Sistem	2025	
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sebagai RS Kelas B, RSUD Sawerigading Kota Palopo harus menyediakan Pelayanan sesuai dengan standar dan mengutamakan keselamatan pasien	2023	Perangkat Penunjang dan Layanan Rawat Jalan	2023	Antrian Online (SIMPONI CERIA)	2023	Sosialisasi dan Promosi Kesehatan	2023	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sawerigading Kota Palopo harus meningkatkan Akreditasi yang telah diperoleh dari Akreditasi Madya Ke Paripurna	2023	Perangkat Penunjang dan Layanan Rawat Jalan	2023	Antrian Online (SIMPONI CERIA)	2023	Sosialisasi dan Promosi Kesehatan	2023	
Sarana Transportasi	Peningkatan akses jalan di kawasan strategis	Pembangunan/Peningkatan Jalan/Pelebaran Jalan Ruas	Pengembangan pariwisata	2023	Talud pengaman jalan	2023	Sistem jaringan informasi jalan	2023	Peningkatam ruas jalan	2023	Dinas Pembangunan Umum
		Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Pengembangan Kawasan industri	2023	Talud pengaman jalan	2023	Sistem jaringan informasi jalan	2023	Peningkatam ruas jalan	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Thn	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Persentase Jalan Kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	2023	Pemeliharaan jalan	2023		2023		2023	

4.1.5 Rencana Aksi Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
Interaksi Masyarakat	Peningkatan mutu penyediaan informasi pada masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Penyusunan peraturan pengembangan program perlindungan kelompok rentan	2023	Ruang pelayanan pelaporan dan pengembangan program untuk kelompok rentan	2023	Database dan portal informasi masyarakat kelompok rentan	2023	Panduan pemberdayaan pada kelompok rentan	2022	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Penyusunan peraturan pengembangan program perlindungan kelompok rentan	2023	Ruang pelayanan pelaporan dan pengembangan program untuk kelompok rentan	2023	Database dan portal informasi masyarakat kelompok rentan	2023	Panduan pemberdayaan pada kelompok rentan (peran gender)		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyusunan peraturan pengembangan program perlindungan kelompok rentan	2023	Ruang pelayanan pelaporan dan pengembangan program untuk kelompok rentan	2023	Database dan portal informasi masyarakat kelompok rentan	2023	Panduan pemberdayaan pada kelompok rentan (peran keluarga)		
	Peningkatan jumlah Akseptor KB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Pemerintahan No. 87 Tahun 2014	2022	Alat Obat Kontrasepsi	2022	Aplikasi New SIGA	2023	Penyuluhan dan Bimbingan Pasangan Usia Subur	2023	Dinas Pengendalian Penduduk & KB

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	Pendampingan Keluarga Beresiko STUNTING	Percepatan Penurunan STUNTING	Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2021	2022	Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko STUNTING	2022	Aplikasi ELSIMIL	2023	Orientasi Pendampingan Keluarga	2023	
Membangun Eskosistem Edukasi / Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan daerah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Penyusunan peraturan tentang pengembangan mutu dan kualitas PTK	2023	Ruang kelas di sekolah, RTH, Ruang Publik	2023	Pengembangan sistem aplikasi kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Guru	2023	Pendayagunaan Akun belajar.id dan Keterlibatan Guru Penggerak	2023	Dinas Pendidikan
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Peningkatan mutu Kesehatan daerah	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat: kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan jaminan masyarakat	Peraturan pemenuhan Kesehatan untuk masyarakat	2023	ada mou dengan dinas capil aplikasi data kependudukan bisa diakses oleh dinas kesehatan)	2023	aplikasi si cakep	2023	sosialisasi ke masyarakat tentang kemudahan pendaftaran bpjs pemda (kantor lurah, puskesmas, dan terkait (setiap kegiatan di sosialisasikan)	2023	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peraturan peningkatan pelayanan kepesertaan ber-KB	2023	gudang khusus alat kontrasepsi, kendaraan operasional untuk pelayanan kb	2023	aplikasi barang (keluar masuknya alat kontrasepsi)	2023	sosialisasi di kecamatan minimal setahun sekali	2023	
		Program Rehabilitasi Sosial	Peraturan perlindungan sosial masyarakat	2023	Pengembangan ruang pusat infomasi dan pelayanan sosial satu pintu	2023	Portal informasi pelayanan sosial	2023	Panduan pelayanan dan perlindungan sosial	2023	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Peraturan perlindungan sosial masyarakat	2023	Pengembangan ruang pusat infomasi dan	2023	Portal informasi pelayanan sosial	2023	Panduan pelayanan dan	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
					pelayanan sosial satu pintu				pelindungan sosial		

4.1.6 Rencana Aksi Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
Pelindungan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Koordinasi Penanganan Lahan Kritis	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembentukan Forum Peduli Sungai	2023	Proteksi DAS dan Normalisasi Sungai	2023	Pembuatan Aplikasi kondisi DAS	2023	Pengelolaan dan pemanfaatan air	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Melaksanakan Penataan Kawasan Permukiman dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Perda RTRW dan RDTR; Pembentukan Petugas Pengelolah Drainase	2023	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau; Pembangunan Drainase	2023	Aplikasi Simtaru	2023	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Aplikasi Simtaru	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan Limbah dan Sampah	Melaksanakan Penataan Kawasan Permukiman dan Mengembang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembuatan Peraturan Walikota Pegelolaan IPLT	2023	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)		Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)		Pelatihan SDM Pengelolah IPLT		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Thn	Penguatan Literasi	Thn	OPD/Leading Sector
	an Ruang Terbuka Hijau										
	Pengelolaan Sampah dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan sampah plastik dan kertas	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengkajian Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah di Kota Palopo; Perwal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan strategi kota palopo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2023	1. Pengadaan bangunan/gudang penyimpanan sampah terkelola 2. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah (motor sampah, alat timbang, dll)	2023	Pembuatan Aplikasi Bank Sampah Kota Palopo	2023	Pelatihan SDM pengelola Bank Sampah	2023	Dinas Lingkungan Hidup
Tata Kelola Energi	Pengontrolan Penggunaan Listrik Daerah	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Palopo	Peraturan penggunaan listrik daerah dan teknologi ramah lingkungan	2023	Pengadaan Prasarana lampu jalan yang berbasis pengontrolan	2023	Pembuatan Aplikasi penerangan jalan umum (PJU)	2023	Pelatihan SDM pengelola data dan pemelihara lampu jalan	2023	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Progrm Jangka Pendek Tahun 2023

BAB IV PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY DAERAH

4.2 Peta Jalan Jangka Pendek (2023)

4.2.1 Peta Jalan *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Kependudukan Yang Berfungsi Baik	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	1 Sistem	237.000.000	APBD	DUKCAPIL
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern oleh seluruh perangkat daerah melalui asistensi / pendampingan oleh Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi E-Audit	90	-	APBD	Inspektorat
		Kegiatan Evaluasi dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Daftar Temuan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI) yang ditindaklanjuti	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		82	-	APBD	Inspektorat
	Optimalisasi dan Integrasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)	1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi e-sakip kota palopo	49 Dokumen	214.976.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Lakip Perangkat Daerah	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		49 Dokumen	102.957.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
Efisiensi Kebijakan Publik	Optimalisasi dan Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen/Laporan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	Aplikasi e-LPDD kota palopo	3 Laporan	137.199.700	APBD	Sekda Bagian Tata Pemerintahan

4.2.2 Peta Jalan Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Pariwisata	Pengembangan Kota Palopo sebagai Kota Kunjungan Wisata Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif/Keg. Pengembangan Sistem Pemasaran	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Dokumen, 1 Kegiatan	57.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Parekraf Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang Dikelola	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Destinasi Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	-	-	APBD	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Usaha Pariwisata yang dlbina	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	10 Kelompok Usaha	Rp. 16.000.000	APBD	
Kemudahan Pelayanan Bisnis	Peningkatan pelayanan pengembangan usaha	Penyediaan peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen petapotenasi dan peluang usaha	-	Aplikasi/Portal Peta Investasi	2 Kecamatan	45.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama antar Daerah Lingkup Dalam Negeri	-	Portal Informasi Potensi Daerah dan Potensi Kerjasama Kota Palopo	-	-	APBD	Sekretariat Daerah Bagian Kerjasama
		Aplikasi berbasis web sebagai market place pariwisata	Aplikasi Pariwisata Palopo yang dimanfaatkan sebagai market place	-	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Unit	50.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Membangun Wajah Kota	Pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan pariwisata berbasis masyarakat	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	-	Portal Informasi Kota Lalebatta / Kota Pusaka	5 Kegiatan	83.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
----------------------	--	---	--	---	---	------------	------------	------	--

4.2.3 Peta Jalan Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Industri Berdaya Saing	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang tumbuh	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Portal Informasi Kawasan Strategis Industri Kota Palopo	443	116.194.000	APBD	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	7%	1.436.329.550	APBD	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya			54%	573.576.675	APBD	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin			20%	38.000.000	APBD	
	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Dapoparekraf	Penyediaan akses layanan internet bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan akses layanan internet	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Aplikasi Dapoparekraf	-	-	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kesejahteraan Masyarakat	Mendorong terwujudnya ketersediaan pangan dan cadangan pangan disertai dengan pengawasan kualitas konsumsi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	112,48 ton	68.285.500	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo

Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan permukiman	100	103.297.450	APBD dan APBD Propinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan permukiman	98,5	2.850.000.000	APBD dan APBN	
		Keg. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan permukiman	98,5	2.688.600.000		
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	122.333.750	DAK	Dinas Kesehatan
		Penemuan Kasus Secara dini (Pemeriksaan Kesehatan)	Jumlah masyarakat yang diperiksa ditempat umum	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	31.632.525	APBD	
	Pencegahan Penyakit Tidak Menular melalui pemeriksaan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Umum Pemerintah Daerah	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	12 Laporan	31.632.525	APBD	
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	122.333.750.000	RSUD SAWERIGA DING PALOPO		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	3 jenis		29.611.750.000	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	22 Layanan		92.722.000.000	

		Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	31.632.525.000		
Sarana Transportasi	Peningkatan akses jalan di kawasan strategis	Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Panjang jalan yang ditangani	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 500 km)	3.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Presentase jalan Kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100 % (Panjang 1 km)	250.000.000	APBD	
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	-	Portal Informasi Dinas Perhubungan	99%	3.320.250.625	APBD	Dinas Perhubungan

4.2.5 Peta Jalan Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan Mutu Penyediaan Informasi Pada Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Portal informasi Dinas Sosial	65%	250.000.000	APBD	Dinas Sosial
	Pengumpulan Data Terpilah Di Setiap Upd Melalui Siga (Sistem Informasi Gender Dan Anak)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Jumlah Sistem Data Gender Dan Anak Yang Berfungsi Baik	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang	Aplikasi Sistem Data Gender	95%	203.100.000	APBD	Dinas Sosial

				ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital					
	Pembentukan Layanan Pengaduan Melalui Aplikasi Simponi	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Database anak terlantar dan kurang mampu	95%	203.100.000	APBD	Dinas Sosial
	Mempertemukan Pencari Kerja Dengan Pemberi Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terserap	-	REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran)	600 Org	155.000.000	APBD	
	Peningkatan Akseptor Kb Dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Akseptor Kb	-	Mempermudah Pencaker Memperoleh Informasi Pekerjaan dan Bagi Pemberi Kerja Dapat Langsung Mengetahui Calon Pekerja	3 Kegiatan	175.000.000	APBD	Dinas Sosial
Membangun Eskosistem Edukasi/ Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Rasio Ideal Guru Dan Siswa	16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.	Memberikan edukasi melalui penyuluhan KB dan optimalisasi layanan aplikasi NEW SIGA dan ELSIMIL	100%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Jumlah Ptk Dan Kualitas Ptk	-	Pemanfaatan Sumberdaya, Keahlian, Kreatiifitas, dan Inovasi untuk mengembangkan lingkungan belajar	100%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Peningkatan Mutu Kesehatan Daerah	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti	-	Portal Informasi Dinas Sosial	100%	350.000.000	APBD	Dinas Sosial

		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga /Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial(%)	-	Portal Informasi Dinas Sosial	56	5.533.625.065	APBD	Dinas Sosial
--	--	---	--	---	-------------------------------	----	---------------	------	--------------

4.2.6 Peta Jalan Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2023		
Pelindungan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Koordinasi Penanganan Lahan Kritis	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang ditangani	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Sungai	70 Ha	312.900.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Melaksanakan Penataan Kawasan Permukiman dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya;	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, Pembentukan Forum Ruang Terbuka Hijau	20%	104.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Drainase	11 %	383.700.000	APBD	
Pengelolaan Limbah dan Sampah	Pengelolaan Sampah dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan sampah plastik dan kertas	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11.Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	1. Pengurangan sampah dengan cara 3R (Reduce, Reuse, Ricycle) dari sumbernya	9 Kelompok	30.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Tata Kelola Energi	Pengontrolan Penggunaan Listrik Daerah	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Palopo	Jumlah lampu jalan yang dikontrol otomatis dan dikontrol melalui smartphone	7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.	1. Aplikasi pengontrolan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) 2. Pengontrolan cahaya	150 Unit	30.000.0000	APBD	UPTD PJU

					dan intensitas lampu jalan				
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Rencana Progrm Jangka Menengah Tahun 2024 - 2027

4.3 Peta Jalan Jangka Menengah (2024-2027)

4.3.1 Peta Jalan Smart Governance

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Kependudukan Yang Berfungsi Baik	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	1 Sistem	237.000.000	1 Sistem	244.000.000	1 Sistem	250.000.000	1 Sistem	282.000.000	APBD	DUKCAPIL
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern oleh seluruh perangkat daerah melalui asistensi / pendampingan oleh Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase jumlah Temuan dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi E-Audit	90	220.000.000	90	225.000.000	90	220.000.000	90	220.000.000	APBD	Inspektorat
		Kegiatan Evaluasi dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Daftar Temuan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI) yang ditindaklanjuti	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		82	195.000.000	82	200.000.000	82	195.000.000	82	195.000.000	APBD	Inspektorat
	Optimalisasi dan Integrasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi e-sakip kota palopo	49 Dokumen	225.980.000	49 Dokumen	234.000.000	49 Dokumen	240.000.000	49 Dokumen	272.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Lakip Perangkat Daerah	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		49 Dokumen	118.186.570	49 Dokumen	124.000.000	49 Dokumen	130.000.000	49 Dokumen	152.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi

Efisiensi Kebijakan Publik	Optimalisasi dan Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen/Laporan Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Aplikasi e-LPDD kota palopo	3 Laporan	137.199.700	3 Laporan	144.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	172.000.000	APBD	Sekda Bagian Tata Pemerintahan
----------------------------	--	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	------	--------------------------------

4.3.2 Peta Jalan Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Pariwisata	Pengembangan Kota Palopo sebagai Kota Kunjungan Wisata Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif/Keg. Pengembangan Sistem Pemasaran	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Parekraf Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang Dikelola	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Destinasi Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	5 Kegiatan	65.000.000	5 Kegiatan	70.000.000	5 Kegiatan	75.000.000	5 Kegiatan	80.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Usaha Pariwisata yang dlbina	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	15 Kelompok	25.000.000	17 Kelompok	28.000.000	20 Kelompok	32.000.000	20 Kelompok	36.000.000	APBD	
Kemudahan Pelayanan Bisnis	Peningkatan pelayanan pengembangan usaha	Penyediaan peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen petapotensi dan peluang usaha	-	Aplikasi/Port al Peta Investasi	2 Kecamatan	55.000.000	2 Kecamatan	65.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

															Satu Pintu
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama antar Daerah Lingkup Dalam Negeri	-	Portal Informasi Potensi Daerah dan Potensi Kerjasama Kota Palopo	1 (Satu) Kegiatan	100.000.000,-	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	APBD	Bagian Kerjasama Sekertariat Daerah
		Aplikasi berbasis web sebagai market place pariwisata	Aplikasi Pariwisata Palopo yang dimanfaatkan sebagai market place	-	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Membran Wajah Kota	Pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan pariwisata berbasis masyarakat	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	-	Portal Informasi Kota Lalebatta / Kota Pusaka	7 Kegiatan	87.000.000	8 Kegiatan	90.000.000	9 Kegiatan	92.000.000		96.000.000	APBD	Dinas Kebudayaan

4.3.3 Peta Jalan Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Industri Berdaya Saing	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang tumbuh	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Portal Informasi Kawasan Strategis Industri Kota Palopo	456	119098850	456	119098850	456	119098850	456	119098850	APBD	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian

		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	E akatalog UMKM	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	APBD	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	55%	587.916.092	60%	595.916.092	60%	601.916.092	80%	687.916.092	APBD	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	25%	38.950.000	50%	68.950.000	75%	130.950.000	75%	135.950.000	APBD	
	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Dapoparekrif	Penyediaan akses layanan internet bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan akses layanan internet	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Aplikasi Dapoparekrif	10%	10.000.000	10%	10.000.000	10%	10.000.000	10%	10.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kesejahteraan Masyarakat	Mendorong terwujudnya ketersediaan pangan dan cadangan pangan disertai dengan pengawasan kualitas konsumsi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	113,38 ton	69.992.638	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo						
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	-	E akatalog UMKM	28%	659.348.000	28%	659.348.000	28%	659.348.000	28%	659.348.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo

Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	100	450.000.000	100	600.000.000	100	450.000.000	100	250.000.000	APBD dan APBD Propinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	98,5	2.850.000.000	98,7	2.850.000.000	98,9	2.850.000.000	98,9	2.850.000.000	APBD dan APBN	
		Keg. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	418,26	2.688.600.000	486,9	2.900.300.000	556,9	3.300.000.000	556,9	3.300.000.000	APBD dan APBN	
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	DAK/BLUD	Dinas Kesehatan
		Penemuan Kasus Secara dini (Pemeriksaan Kesehatan)	Jumlah masyarakat yang diperiksa ditempat umum	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000		
	Pencegahan Penyakit Tidak Menular melalui pemeriksaan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Umum Pemerintah Daerah	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	12 Laporan	31.632.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO						

	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100 %	122.333.750.000	100 %	122.333.750.000	100 %	122.333.750.000	100 %	122.333.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	3 jenis	29.611.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	22 Layanan	92.722.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100 %	31.632.525.000	100 %	33.620.525.000	100 %	33.620.525.000	100 %	35.160.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
Sarana Transportasi	Peningkatan akses jalan di kawasan strategis	Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Panjang jalan yang ditangani	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100 % (Panjang 5,57 Km)	7.822.600.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO						
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Presentase jalan Kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100 % (Panjang 1 km)	250.000.000	100 % (Panjang 1 km)	253.000.000	100 % (Panjang 1 km)	256.000.000	100 % (Panjang 1 km)	250.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO

		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	-	Portal Informasi Dinas Perhubungan	99%	3.320.250.625	99%	3.325.250.625	99%	3.330.500.625	99%	3.320.250.625	APBD	Satpol PP
--	--	---	---	---	------------------------------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	------	-----------

4.3.5 Peta Jalan Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan Mutu Penyediaan Informasi Pada Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Portal informasi Dinas Sosial	65%	250.000.000	85%	274.000.000	85%	280.000.000	65%	250.000.000	APBD	Dinas Sosial
	Pengumpulan Data Terpilih Di Setiap Upd Melalui Siga (Sjstem Informasi Gender Dan Anak)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Jumlah Sistem Data Gender Dan Anak Yang Berfungsi Baik	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Aplikasi Sistem Data Gender	95%	205.100.000	95%	207.100.000	95%	210.100.000	95%	215.100.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pembentukan Layanan Pengaduan Melalui Aplikasi Simponi	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi	Database anak terlantar dan kurang mampu	95%	205.100.000	95%	207.100.000	95%	210.100.000	95%	215.100.000	APBD	Perempuan dan Perlindungan Anak

				pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.											
	Mempertemukan Pencari Kerja Dengan Pemberi Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terserap	-	Portal Dinas Tenaga Kerja	700 Org	158.000.000	800 Org	165.000.000	850 Org	200.000.000	850 Org	200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Akseptor Kb Dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Akseptor Kb	-	Memperluas Pencaker Memperoleh Informasi Pekerjaan dan Bagi Pemberi Kerja Dapat Langsung Mengetahui Calon Pekerja	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Membangun Eskosistem Edukasi / Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Rasio Ideal Guru Dan Siswa	16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.	Memberikan edukasi melalui penyuluhan KB dan optimalisasi layanan aplikasi NEW SIGA dan ELSIMIL	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	265.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Jumlah Ptk Dan Kualitas Ptk	-	Pemanfaatan Sumberdaya, Keahlian, Kreatifitas, dan Inovasi untuk mengembangkan lingkungan belajar	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan

Menjam in Keselam atan Masyar akat	Peningkatan Mutu Kesehatan Daerah	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penduduk Penyangang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti	-	Portal Informasi Dinas Sosial	10 %	350.000.00 0	35 %	350.000.00 0	50 %	350.000.00 0	80 %	350.000.00 0	APBD	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga /Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial(%)	-	Portal Informasi Dinas Sosial	56	5.533.625.0 65	56	5.533.625. 065	56	5.533.625. 065	56	5.533.625. 065	APBD	Dinas Sosial

4.3.6 Peta Jalan Smart Environment

Sub- Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran								Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2024	TK	Angg. 2025	TK	Angg. 2026	TK	Angg. 2027		
Pelindu ngan Lingkun gan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Koordinasi Penanganan Lahan Kritis	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang ditangani	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Portal Dinas Lingkungan Hidup	70 Ha	312.900.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	APBD	Dinas Lingkunga n Hidup
	Melaksanakan Penataan Kawasan Permukiman dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya;	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, Pembentukan Forum Ruang Terbuka Hijau	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum

		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Drainase	10 %	383.700.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum
Pengelolaan Limbah dan Sampah	Pengelolaan Sampah dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan sampah plastik dan kertas	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11.Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	1. Pengurangan sampah dengan cara 3R (Reduce, Reuse, Ricycle) dari sumbernya	20 %	150.000.000	25 %	100.000.000	25 %	50.000.000	25 %	50.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Penataan Ruang)
Tata Kelola Energi	Pengontrolan Penggunaan Listrik Daerah	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Palopo	Jumlah lampu jalan yang dikontrol otomatis dan dikontrol melalui smartphone	7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.	1. Aplikasi pengontrolan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) 2. Pengontrolan cahaya dan intensitas lampu jalan	150 unit	30.000.000	200 unit	45.000.000	200 unit	45.000.000	150 unit	30.000.000	APBD	UPTD PJU

**Rencana Progrm Jangka Panjang
Tahun 2028 - 2032**

4.4 Peta Jalan Jangka Panjang (2028-2032)

4.4.1 Peta Jalan Smart Governance

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Kependudukan Yang Berfungsi Baik	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online	1 Sistem	237.000.000	1 Sistem	237.000.000	1 Sistem	244.000.000	1 Sistem	250.000.000	1 Sistem	282.000.000	APBD	DUKCAPIL
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern oleh seluruh perangkat daerah melalui asistensi / pendampingan oleh Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase jumlah Temuan dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi E-Audit	90	220.000.000	90	220.000.000	90	225.000.000	90	220.000.000	90	220.000.000	APBD	Inspektorat
		Kegiatan Evaluasi dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Daftar Temuan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI) yang ditindaklanjuti	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		82	195.000.000	82	195.000.000	82	200.000.000	82	195.000.000	82	195.000.000	APBD	Inspektorat

	Optimalisasi dan Integrasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)	1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota	Aplikasi e-sakip kota palopo	49 Dokumen	225.980.000	49 Dokumen	225.980.000	49 Dokumen	234.000.000	49 Dokumen	240.000.000	49 Dokumen	272.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Lakip Perangkat Daerah	10.4 Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi kota		49 Dokumen	118.186.570	49 Dokumen	118.186.570	49 Dokumen	124.000.000	49 Dokumen	130.000.000	49 Dokumen	152.000.000	APBD	Sekda Bagian Organisasi
Efisiensi Kebijakan Publik	Optimalisasi dan Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen/Laporan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Aplikasi e-LPDD kota palopo	3 Laporan	137.199.700	3 Laporan	137.199.700	3 Laporan	144.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	172.000.000	APBD	Sekda Bagian Tata Pemerintahan

4.4.2 Peta Jalan Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Pariwisata	Pengembangan Kota Palopo sebagai Kota Kunjungan Wisata Kesehatan, Pendidikan, dan Kota Pusaka	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif/Keg. Pengembangan Sistem Pemasaran	Aplikasi Kota Kunjungan Wisata (promosi, edukasi, dan market place)	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	1 Kali	24.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat	Destinasi Kesehatan,	5 Kezia	65.000.000	5 Kezia	65.000.000	5 Kezia	70.000.000	5 Kezia	75.000.000	5 Kezia	80.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan

		Dinas Parekrif Kota Kabupaten/ Kota	Prioritas yang Dikelola	dipesan secara daring	Pendidikan, dan Kota Pusaka	tan		gia tan		gia tan		gia tan		gia tan			Ekonomi Kreatif
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Usaha Pariwisata yang dlbina	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	15 Kelompok	25.000.000	15 Kelompok	25.000.000	17 Kelompok	28.000.000	20 Kelompok	32.000.000	20 Kelompok	36.000.000	APBD	
Kemudahan Pelayanan Bisnis	Peningkatan pelayanan pengembangan usaha	Penyediaan peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen petapensi dan peluang usaha	-	Aplikasi/ Portal Peta Investasi	2 Kecamatan	55.000.000	2 Kecamatan	55.000.000	2 Kecamatan	65.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	1 Kecamatan	40.000.000	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama antar Daerah Lingkup Dalam Negeri	-	Portal Informasi Potensi Daerah dan Potensi Kerjasama Kota Palopo	1 (Satu) Kegiatan	100.000.000,-	1 (Satu) Kegiatan	100.000.000,-	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	1 (satu) Kegiatan	50.000.000	APBD	Bagian Kerjasama Sekertariat Daerah
		Aplikasi berbasis web sebagai market place pariwisata	Aplikasi Pariwisata Palopo yang dimanfaatkan sebagai market place	-	Aplikasi / Website Pariwisata Kota Palopo	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	1Unit Operasional	6.000.000	6.000.000	APBD
Memanggun	Pengembangan	Perlindungan,	Jumlah Karya Budaya yang	-	Portal Informasi	7 Ke	87.000.000	7 Ke	87.000.000	8 Ke	90.000.000	9 Ke	92.000.000		96.000.000	APBD	Dinas Kebudayaan

Wajah Kota	pengelolaan kawasan cagar budaya dan pariwisata berbasis masyarakat	Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		Kota Lalebatta / Kota Pusaka	giatan		giatan		giatan		giatan						
------------	---	---	---	--	------------------------------	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

4.4.3 Peta Jalan Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Industri Berdaya Saing	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang tumbuh	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Portal Informasi Kawasan Strategis Industri Kota Palopo	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	456	119.098.850	APBD	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	E akatalog UMKM	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	9%	1.518.087.788	APBD	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktivitasnya	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan.	Portal Informasi Dinas Pertanian	55%	587.916.092	55%	587.916.092	60%	595.916.092	60%	601.916.092	80%	687.916.092	APBD	
		Program Perizinan	Persentase Usaha	20.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk	Portal Informasi	25%	38.950.000	25%	38.950.000	50%	68.950.000	75%	130.950.000	75%	135.950.000	APBD	

		Usaha Pertanian	Pertanian yang Berizin	inisiatif pertanian perkotaan.	Dinas Pertanian												
	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Dapoparekraf	Penyediaan akses layanan internet bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan akses layanan internet	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	Aplikasi Dapoparekraf	10 %	10.000.000	10 %	10.000.000	10 %	10.000.000	10 %	10.000.000	10 %	10.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kesejahteraan Masyarakat	Mendorong terwujudnya ketersediaan pangan dan cadangan pangan disertai dengan pengawasan kualitas konsumsi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi hasil perikanan	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	11,38 ton	69.992.638	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo								
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)		E akatalog UMKM	28 %	659.348.000	28 %	659.348.000	28 %	659.348.000	28 %	659.348.000	28 %	659.348.000	28 %	659.348.000
	Pengembangan komoditas unggulan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar (%)	5.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk.	E akatalog UMKM	30,76 %	40.000.000	30,76 %	40.000.000	30,76 %	40.000.000	30,76 %	40.000.000	30,76 %	40.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
Transaksi Keuangan	Peningkatan kualitas pelayanan transaksi elektronik	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pengelolaan Layanan Pengadaan	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah (Jumlah	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	E akatalog UMKM	4 laporan	202.590.800	4 laporan	202.590.800	4 laporan	207.050.800	4 laporan	212.100.800	4 laporan	220.590.800	APBD	Dinas Perdagangan

	Secara Elektronik)	Paket Sistem Informasi E-procurement yang dikelola)															
Pengoptimalan Kualitas Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Angka Persentase Koperasi yang aktif	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Koperasi	70 Koperasi	20.000.000	70 Koperasi	20.000.000	73 Koperasi	20.000.000	75 Koperasi	20.000.000	75 Koperasi	20.000.000	APBD	Dinas Koperasi dan UKM	
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Mikro dan Kecil	Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	9.1 Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	E akatalog UMKM	200 UMK	307.281.250	200 UMK	307.281.250	200 UMK	353.603.438	200 UMK	406.643.954	200 UMK	415.643.954	APBD		

4.4.4 Peta Jalan Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector		
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031			TK	Angg. 2032
Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	100	450.000.000	100	450.000.000	100	600.000.000	100	450.000.000	100	250.000.000	APBD dan APBD Propinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

		Program Kawasan Permukiman	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni (%)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	98,5	2.850.000.000	98,5	2.850.000.000	98,7	2.850.000.000	98,9	2.850.000.000	98,9	2.850.000.000	APBD dan APBN	
		Keg. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	12.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar.	Portal informasi program layanan pemukiman	418,26	2.688.600.000	418,26	2.688.600.000	486,9	2.900.300.000	556,9	3.300.000.000	556,9	3.300.000.000	APBD dan APBN	
Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	DAK/BLUD	Dinas Kesehatan
		Penemuan Kasus Secara dini (Pemeriksaan Kesehatan)	Jumlah masyarakat yang diperiksa ditempat umum	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000		
	Pencegahan Penyakit Tidak Menular melalui pemeriksaan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Umum Pemerintah Daerah	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan.	Portal Informasi Dinas Kesehatan	12 Laporan	31.632.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO								
	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui	Aplikasi / Portal Pelayanan	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	100%	122.333.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO

	terhadap Rumah Sakit			jarak jauh per 100.000 penduduk.	Rumah Sakit												
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal health Coverage (%)	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	3 jenis	29.611.750.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO								
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	22 Layanan	92.722.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO								
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi	11.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk.	Aplikasi / Portal Pelayanan Rumah Sakit	100%	31.632.525.000	100%	31.632.525.000	100%	33.620.525.000	100%	33.620.525.000	100%	35.160.525.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO
Sarana Transportasi	Peningkatan akses jalan di kawasan strategis	Peningkatan Jalan Kawasan Industri	Panjang jalan yang ditangani	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 5,577 Km)	7.822.600.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIG ADING PALOPO								

	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Presentase jalan Kota dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	19.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (<i>real time</i>) yang dapat diakses publik.	Portal Informasi Dinas Pekerjaan Umum	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	100% (Panjang 1 km)	253.000.000	100% (Panjang 1 km)	256.000.000	100% (Panjang 1 km)	250.000.000	DAK/BLUD	RSUD SAWERIGADING PALOPO
	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	-	Portal Informasi Dinas Perhubungan	99%	3.320.250.625	99%	3.320.250.625	99%	3.325.250.625	99%	3.330.500.625	99%	3.320.250.625	APBD	Satpol PP

4.4.5 Peta Jalan Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Interaksi Masyarakat	Peningkatan Mutu Penyediaan Informasi Pada Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Portal informasi Dinas Sosial	65%	250.000.000	65%	250.000.000	85%	274.000.000	85%	280.000.000	65%	250.000.000	APBD	Dinas Sosial
	Pengumpulan Data Terpilah Di Setiap Upd Melalui Siga (Sjstem	Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Jumlah Sistem Data Gender Dan Anak Yang Berfungsi Baik	13.4 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang	Aplikasi Sistem Data Gender	95%	205.100.000	95%	205.100.000	95%	207.100.000	95%	210.100.000	95%	215.100.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

	Informasi Gender Dan Anak)			ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital												Perlindungan Anak	
	Pembentukan Layanan Pengaduan Melalui Aplikasi Simponi	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	13.2 Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.	Database anak terlantar dan kurang mampu	95 %	205.100.000	95 %	205.100.000	95 %	207.100.000	95 %	210.100.000	95 %	215.100.000	APBD	Perempuan dan Perlindungan Anak
	Mempertemukan Pencari Kerja Dengan Pemberi Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terserap	-	REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran)	700 Org	158.000.000	700 Org	158.000.000	800 Org	165.000.000	850 Org	200.000.000	850 Org	200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Akseptor Kb Dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Akseptor Kb	-	Memper mudah Pencaker Memperoleh Informasi Pekerjaan dan Bagi Pemberi Kerja Dapat Langsung Mengetahui Calon Pekerja	5 Kegiatan	200.000.000	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Membangun Eskosistem Edukasi /	Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah Yang Memenuhi Rasio Ideal Guru Dan Siswa	16.3 Jumlah tingkat pendidikan tinggi Sains, Teknologi, Teknik Dan Matematika (STEM) per 100.000 penduduk.	Memberikan edukasi melalui penyuluhan KB dan optimalisasi layanan aplikasi	5 Kegiatan	200.000.000	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	225.000.000	8 Kegiatan	250.000.000	8 Kegiatan	265.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

Pendidikan					NEW SIGA dan ELSIMIL												
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan Jumlah Ptk Dan Kualitas Ptk	-	Pemanfaatan Sumberdaya, Keahlian, Kreatifitas, dan Inovasi untuk mengembangkan lingkungan belajar	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	100%	65.528.532	APBD	Dinas Pendidikan
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Peningkatan Mutu Kesehatan Daerah	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti	-	Portal Informasi Dinas Sosial	10%	350.000.000	10%	350.000.000	35%	350.000.000	50%	350.000.000	80%	350.000.000	APBD	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga /Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial(%)	-	Portal Informasi Dinas Sosial	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	56	5.533.625.065	APBD	Dinas Sosial

4.4.6 Peta Jalan Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Ke- giatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						TK	Angg. 2028	TK	Angg. 2029	TK	Angg. 2030	TK	Angg. 2031	TK	Angg. 2032		
Pelindun- gan Lingku- ngan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Koordinasi Penanganan Lahan Kritis	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang ditangani	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Sungai	70 Ha	312.900.000	70 Ha	312.900.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	70 Ha	334.000.000	APBD	Dinas Lingku- ngan Hidup
	Melaksanakan Penataan Kawasan Permukiman dan Mengembang- kan Ruang Terbuka Hijau	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungann ya;	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Pengadaa- n Ruang Terbuka Hijau, Pembentu- kan Forum Ruang Terbuka Hijau	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	20 %	104.500.000	APBD	Dinas Pekerjaa- n Umum
		Program Pengelolaan dan Pengemban- gan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	23.4 Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh system cerdas.	Sistem Informasi Kondisi Drainase	10 %	383.700.000	10 %	383.700.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	10 %	404.800.000	APBD	Dinas Pekerjaa- n Umum
Pengelo- laan Limbah dan Sampah	Pengelolaan Sampah dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	11.Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan	1. Penguran- gan sampah dengan cara 3R (Reduce,	20 %	150.000.000	20 %	150.000.000	25 %	100.000.000	25 %	50.000.000	25 %	50.000.000	APBD	Dinas Pekerjaa- n Umum (Bidang Penataan Ruang)

	sampah plastik dan kertas	Persampahan	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	Reuse, Ricycle) dari sumbernya												
Tata Kelola Energi	Pengontrolan Penggunaan Listrik Daerah	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Palopo	Jumlah lampu jalan yang dikontrol otomatis dan dikontrol melalui smartphone	7.6 persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu.	1. Aplikasi pengontrolan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) 2. Pengontrolan cahaya dan intensitas lampu jalan	150 unit	30.000.000	150 unit	30.000.000	200 unit	45.000.000	200 unit	45.000.000	150 unit	30.000.000	APBD	UPTD PJU

5 DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City. Kemenkominfo RI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021b). SNI ISO37122:2019 Indikator Untuk Kota

Peraturan Daerah

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 247 / VI / 2022 tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo

Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 248 / VI / 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palopo

**BUKU II
KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI
SELATAN
TAHUN 2022**